

**RANCANGAN
AKHIR
RENCANA KERJA
2024**



**KECAMATAN NGAWI
KABUPATEN NGAWI
2023**



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 77-A TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf b dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi dan disempurnakan ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
26. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
29. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
30. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
32. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 211);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 02 Seri D);
44. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 41 Seri E);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 275);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 277);
50. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 144 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 144 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 70 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 70);
51. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 28);
52. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2024 disusun berpedoman pada:

- a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- b. hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu; dan
- c. hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2024 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD.

Pasal 4

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - e. BAB V : PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 11 Agustus 2023

BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 11 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023 NOMOR 77-A

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR ~~77A~~ TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA KECAMATAN NGAWI
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ngawi merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD), serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Ngawi menyusun Rencana Kerja Kecamatan Ngawi Tahun 2024 yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ngawi. Rencana Kerja Kecamatan Ngawi Tahun 2024

disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kecamatan Ngawi Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024.

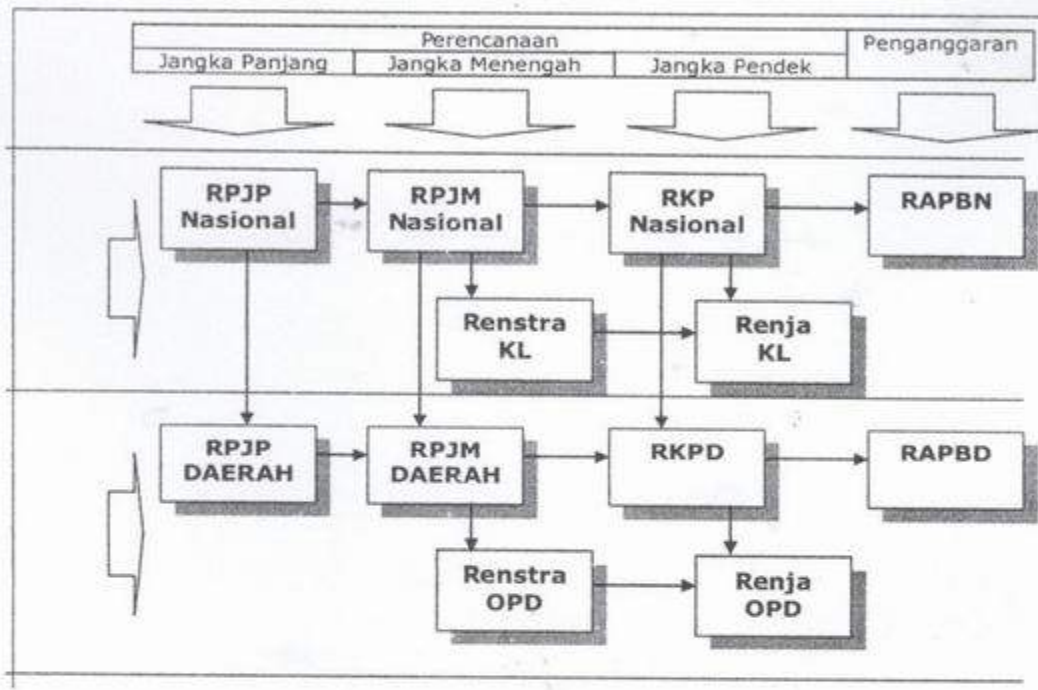
Perencanaan program kegiatan merupakan hal yang mendasar bagi terselenggaranya suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kecamatan Ngawi telah menetapkan langkah-langkah kebijakan dalam rangka capaian program setiap tahun yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Ngawi Tahun 2021-2026 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Kerja Kecamatan Ngawi Tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, disusun dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat.

Ruang lingkup Rencana Kerja Tahun 2024 adalah pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan memperhitungkan faktor-faktor penentu keberhasilan yang ada, dan

tujuan pembangunan yang realistis yang dapat dicapai. RENJA Kecamatan Ngawi Tahun 2024 merupakan RENJA yang disusun menyesuaikan perubahan struktur organisasi perangkat daerah sehingga RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2022-2026 dan RENSTRA Perubahan Kecamatan Ngawi 2021-2026 harus disesuaikan, yang dijelaskan dengan diagram alir sebagai berikut:



Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025;
2. Rancangan Awal RKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2024;
3. Hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2024 dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang

disusun dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian Target Kinerja;

4. Pedoman Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ngawi menggunakan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, ~~Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286~~);
4. ~~Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);~~
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); I-10

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); I-11
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); I-12
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941); I-13
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
26. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); I-14
28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
29. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tentang Kebijakan kabupaten atau Kota Layak anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 2023)
30. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970); I-16
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
 39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
 40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D); I-17
 41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur

- Nomor 4 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Proinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
42. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 41 Seri E);
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor.10);
 44. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun.2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);
 45. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 8);
 46. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 9);
 47. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi nomor 220);
 48. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 1);
 49. Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 125 Tahun 2021) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 51 Perubahan Renstra Perangkat

Daerah Nomor 51 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 51)

50. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Tata Kerja Kecamatan;
51. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 25)

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Kecamatan Ngawi Tahun 2024 dimaksudkan untuk menyempurnakan arah kebijakan dalam dokumen induk yaitu Rencana Strategis Kecamatan Ngawi 2021-2026. Selain itu maksud dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ngawi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Untuk menciptakan sinergi antara sasaran dan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Kecamatan Ngawi Tahun 2024 dengan Rencana Strategis Kecamatan Ngawi 2021-2026.
2. Untuk menjamin konsistensi dan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengawasan Rencana Kerja Kecamatan Ngawi Tahun 2024 dengan Rencana Strategis Kecamatan Ngawi 2021-2026.

Sedangkan tujuan Rencana Kerja Kecamatan Ngawi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Merupakan pedoman bagi Kecamatan Ngawi dalam melaksanakan tugas Pemerintahan selama jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Kecamatan Ngawi.
2. Merupakan penetapan langkah-langkah kebijakan melalui

kegiatan operasional yang disesuaikan dengan kebutuhan prioritas program dan kegiatan mendukung tugas-tugas Pemerintah Daerah dalam pembangunan Kecamatan Ngawi dengan target dan sasaran yang efisien, efektif dan terukur.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun dokumen Rencana Kerja Kecamatan Ngawi Tahun 2024 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaah Usulan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

HASIL EVALUASI
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Kecamatan Ngawi adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi SKPD dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik atau tahunan. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Kecamatan Ngawi ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Ngawi Tahun 2022 dan perkiraan target Tahun 2023. Kinerja Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2024 disusun berdasarkan indikator yang ditetapkan pada masing-masing kegiatan yang dilaksanakan.

Untuk evaluasi kinerja ini dikelompokkan dalam indikator Masukan, Keluaran, Hasil, Manfaat dan Dampak yang tertuang dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan Kecamatan Ngawi.

Anggaran Tahun 2022 Kecamatan Ngawi untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 10.000.263.397 ,00 (termasuk perubahan)

dengan 5 (lima) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub.kegiatan Kinerja Kecamatan Ngawi Tahun 2022 tertuang dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan dimana hasil prosentase yang dicapai oleh masing-masing kegiatan tingkat realisasinya baik. Prosentase pencapaian kinerja masing-masing kegiatan berkisar antara 0% sampai dengan 100% dan setiap tahun sesuai data yang ada mengalami peningkatan. Ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Ngawi adalah baik.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan seringkali ditemukan hambatan dimana ada kegiatan yang realisasinya tidak mencapai 100%. Dari semua target kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan, terdapat 1 (satu) indikator program yang tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Sesuai penetapan kinerja Kecamatan Ngawi telah memprogramkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Selanjutnya Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 tertera dalam lampiran tabel 2.1 pada halaman berikutnya:

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat diserap melalui mekanisme musyawarah rencana pembangunan. Musyawarah rencana pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah. Musrenbang mempunyai tujuan untuk mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah Kabupaten Ngawi pada musrenbang tingkat kecamatan dan/atau sebelum musrenbang tingkat kabupaten dilaksanakan dan untuk mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Ngawi.

- Masukan/bahan musrenbang dari masyarakat adalah berupa usulan gagasan/ide melalui forum perencanaan pembangunan daerah yang sudah disusun secara terstruktur dan diselaraskan dengan skala prioritas daerah.
- Masukan/bahan musrenbang dari desa/kelurahan berupa Berita Acara Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan. Hasil usulan program dan kegiatan pembangunan daerah yang perlu dibiayai APBD Kabupaten sesuai dengan hasil yang sudah disepakati.
- Masukan/bahan musrenbang dari kecamatan adalah berupa Berita Acara Hasil Musrenbang tingkat kecamatan yang diselenggarakan pada bulan Februari. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan yang sudah dimutakhirkan sesuai hasil Berita Acara Musrenbang tingkat Kecamatan dan diselaraskan dengan skala prioritas kegiatan serta sudah dipilah menurut Perangkat Daerah dan sumber pendanaannya.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Ngawi dan
Pencapaian Renstra Kecamatan Ngawi s/d Tahun 2023
Kabupaten Ngawi

SKPD : KECAMATAN NGAWI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) s/d Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
Program														
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
Kegiatan :														
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
Sub Kegiatan :														
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penganggaran perangkat daerah yang disusun	16 Dokumen	8 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	-	12 Dokumen	75%
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29 Dokumen	10 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	100%	9 Dokumen	30 Dokumen	103%
Sub Kegiatan :														
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	-	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	0%
Sub Kegiatan :														
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	-	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	0%
Sub Kegiatan :														
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-	-	-	0%	2 Dokumen	2 Dokumen	0%
Sub Kegiatan :														
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	-	-	0%	2 Dokumen	2 Dokumen	0%

Sub Kegiatan :														
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun	22 Laporan	8 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100%	7 Laporan	21 Laporan	95%
Kegiatan :														
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
Sub Kegiatan :														
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	2520 kali	840 kali	840 kali	840 kali	100%	0 Kali	1680 Kali	67%
						Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN yang disusun	82 Dokumen	26 Dokumen	26 Dokumen	26 Dokumen	100%	28 Dokumen	80 Dokumen	98%
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	-	0%	1904 Orang/Bulan	1904 Orang/Bulan	0%
Sub Kegiatan :														
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi	-	-	-	-	0%	1 Laporan	1 Dokumen	0%
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	0%
Sub Kegiatan :														
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan yang disusun	76 Laporan	12 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	100%	-	60 Laporan	79%
						Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	14 Laporan	6 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	-	8 Laporan	57%
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	-	0%	50 Laporan	50 Laporan	0%
Kegiatan :														
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terpenuhi administrasi kepegawaiannya dalam setahun	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100%
Sub Kegiatan :														
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang dibeli/diadakan	110	75 Stel	-	-	0%	-	75 Stel	0%
						Jumlah Pakaian Batik yang dibeli/diadakan	150	150 meter	-	-	0%	-	150 Meter	0%
						Jumlah pakaian olahraga yang dibeli/diadakan	30	-	-	-	0%	-	- Meter	0%
Kegiatan :														
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sub Kegiatan :														
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	1

						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	0%	1 Paket	1 Paket	0%
Sub Kegiatan :														
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan ATK	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	1
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	0%	2 Paket	2 Paket	0%
Sub Kegiatan :														
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan yang disediakan	2,510 Kotak	920 Kotak	80 Kotak	80 Kotak	100	-	1000 Kotak	0.40
						Jumlah minuman yang disediakan	3,072 Kotak	1,482 Kotak	80 Kotak	80 Kotak	100	-	1562 Kotak	0.51
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	0%	4 Paket	4 Paket	0%
Sub Kegiatan :														
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	13,649 Lembar	5,698 Lembar	1,951 Lembar	1,951 Lembar	100	-	7,649 Lembar	1
						Jumlah barang yang digandakan	13,600 Lembar	6,000 Lembar	3,600 Lembar	3,600 Lembar	100	-	9,600 Lembar	1
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	-	-	0%	2 Paket	2 Paket	0%
Sub Kegiatan :														
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar yang disediakan	65 Eksemplar	-	65 Eksemplar	65 Eksemplar	100	-	65 Dokumen	100%
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan yang Disediakan	-	-	-	-	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	0%
Sub Kegiatan :														
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dihadiri/diikuti	59 Kali	25 Kali	13 Kali	13 Kali	100	0 Kali	38 Kali	1
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	-	0%	5 Laporan	5 Laporan	0%
Kegiatan :														
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan dalam setahun	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100%
Sub Kegiatan :														
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dibeli/diadakan	8 Unit	-	4 Unit	4 Unit	100	-	4 Unit	50%
Sub Kegiatan :														
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah meubelair yang diadakan	104 Unit	4 Unit	7.00	7.00	100	7 unit	18 unit	0.17
						Jumlah Paket Mebel yang disediakan	-	-	-	-	0%	7 Paket	7 Paket	0%
Sub Kegiatan :														
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	24 unit	15 unit	-	-	0%	1 unit	16 unit	0.67

Sub Kegiatan :																			
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana gedung atau Bangunan Lainnya yang disediakan	2	Unit	2	Unit	-	-	0%	7	unit	9	Unit	4.50	
Kegiatan :																			
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100		100	%	100	%	100%	100	%	100	%	1	
Sub Kegiatan :																			
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikirim	2100	Surat	1000	Surat	300	Surat	300	Surat	0%	-	1300	Surat	0.62
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Rurat Menyurat	-		-		-			65	Laporan	65	Laporan	0%	
Sub Kegiatan :																			
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon yang dibayar (jumlah rekening x bulan)	180	Rekening	60	Rekening	60	Rekening	60	Rekening	100%	-	120	Rekening	0.7
						Jumlah rekening listrik yang dibayar (jumlah rekening x bulan)	180	Rekening	60	Rekening	60	Rekening	60	Rekening	100%	-	120	Rekening	0.7
						Jumlah rekening air yang dibayar (jumlah rekening x bulan)	180	Rekening	60	Rekening	60	Rekening	60	Rekening	100%	-	120	Rekening	0.7
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-		-		0%	264	Laporan	264	Laporan	0%	
Sub Kegiatan :																			
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat kebersihan yang dibeli	350	Buah	52	Buah	52	Buah	52	Buah	100%	-	368	Buah	1.05
						Jumlah bahan kebersihan yang dibeli	384	Buah	72	Buah	72	Buah	72	Buah	100%	-	144	Buah	0.38
						Jumlah pembayaran jasa Keamanan	72	Kali	60	Kali	60	Kali	60	Kali	100%	-	120	Kali	1.67
						Jumlah pembayaran jasa kebersihan	282	Kali	150	Kali	150	Kali	150	Kali	100%	-	300	Kali	1.06
						Jumlah pembayaran jasa Operator	72	Kali	24	Kali	24	Kali	24	Kali	100%	-	48	Kali	0.67
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-		-		0%	108	Laporan	108	Laporan	0%	
Sub Kegiatan :																			
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembayaran Honor (Jumlah orang x bulan)	321	Kali	36	Kali	36	Kali	36	Kali	100%	-	72	Kali	0.22
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-		-		0%	48	Laporan	48	Laporan	-	
Kegiatan :																			
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun	100%		100%		100%		100%	100%		100%		100%	
Sub Kegiatan :																			
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dibayar pajaknya	44	Unit	13	Unit	13	Unit	13	Unit	100%	-	26	Unit	0.59

						Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional (jumlah unit kendaraan x jumlah pemeliharaan)	8 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	100%	-	8 Kali	1.00
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						37 Unit	37 Unit	0%
Sub Kegiatan :														
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kerja yang diperbaiki (jumlah unit x jumlah perbaikan)	37 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	100%	0 Kali	10 Kali	0.27
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	-	0%	21 Unit	21 Unit	0%
Program														
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan masyarakat yang dilayani tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						Persentase Aspek penilaian IKM Kecamatan dalam Kategori minimal baik	82%	100%	82%	82%	100%	83%	100%	100%
Sub Kegiatan :														
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan kecamatan	86%	85%	86%	86%	100%	87%	86%	100%
Sub Kegiatan :														
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-	-	0%	12 Laporan	12 Laporan	0%
						Jumlah monev pelayanan Desa	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	-	12 Laporan	1.00
						Jumlah Dokumen IKM Desa yang disusun Up to date	24 Dokumen	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	1 Dokumen	13 Dokumen	0.54
						Jumlah Rapat koordinasi Peningkatan Pelayanan Kecamatan	12 Kali	-	12 Kali	12 Kali	100%	-	12 Kali	1.00
						Jumlah Peringatan Hari Besar/Nasional yang difasilitasi	-	-	-	-	0%	-	-	-
Kegiatan :														
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah laporan hasil fasilitasi kegiatan kesos di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sub Kegiatan :														
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan Non Usaha	Jumlah hasil koordinasi peningkatan pelayanan kecamatan dan desa yang ada dikecamatan	16 Laporan	-	16 Laporan	16 Laporan	100%	-	16 Laporan	1.00
Sub Kegiatan :														
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah fasilitasi Kecamatan Sehat	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1	100%	1 Kali	3 Kali	3.00

						Jumlah fasilitasi GSI	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1	100%	1 Kali	3 Kali	3.00	
						Jumlah fasilitasi RTLH	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5	100%	5 Unit	15 Unit	3.00	
						Jumlah fasilitasi bantuan korban bencana	10 Paket	5 Paket	10 Paket	10	100%	10 Paket	25 Paket	2.50	
						Jumlah Fasilitasi bantuan sosial masyarakat	48 Paket	24 Paket	48 Paket	48	100%	48 Paket	120 Paket	2.50	
						Jumlah fasilitasi Kampung KB	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1	100%	1 Kali	3 Kali	3.00	
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang diLimpahkan	-	-	-	-	0%	12 Laporan	12 Laporan	0%	
Program															
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	68,75%	62,50%	68,75%	68,75%	100%	75,00%	100%	
Kegiatan :															
7	01	03	2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase laporan hasil fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	0%	-	100%	100%
Sub Kegiatan :															
7	01	03	2.01	03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi lintas sektor terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat	12 Laporan	0	12 Laporan	12 Laporan	100%	-	12 Laporan	100%
							Jumlah Koordinasi, konsultasi dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat	-	-	-	-	0%	-	-	0%
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-	-	0%	12 Laporan	12 Laporan	0%
							Jumlah Sosialisasi Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-	-	0%	-	-	0%
Sub Kegiatan :															
7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan hasil fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	1.00
Sub Kegiatan :															
7	01	03	2.02	01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah laporan Pembinaan Masyarakat yang tindak lanjuti	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	-	8 Laporan	2
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	-	-	-	0%	7 Lembaga	7 Lembaga	-
							Jumlah Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan	60 Orang	40 Orang	60 Orang	60 Orang	100%	-	100 Orang	2
Sub Kegiatan :															

7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pengadaan dan Pembangunan Sarana Kesehatan Lingkungan	6	Unit	4	Unit	6	Unit	6	Unit	100%	-	10	Unit	2	
						Jumlah pengadaan dan pembangunan sarana Pendidikan dan kebudayaan Lingkungan	6	Unit	4	Unit	6	Unit	6	Unit	100%	-	10	Unit	2	
						Luasan Drainase Kelurahan yang dibangun	3.800	M3	3.128	M3	3.800	M3	3.800	M3	100%	-	6.928	M3	2	
						Luasan Pavingisasi Kelurahan yang dibangun	3.000	M2	2.795	M2	3.000	M2	3.000	M2	100%	-	5.795	M2	2	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-		-		-		0%	24	Paket	24	Paket	-
					Sub Kegiatan :															
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan	16	Kali	8	Kali	16	Kali	16	Kali	100%	16	Kali	40	Kali	3
						Jumlah laporan pemberdayaan kelompok masyarakat Kelurahan yang ditindak lanjuti	16	Laporan	8	Laporan	16	Laporan	16	Laporan	100%	16	Laporan	40	Laporan	3
						Luasan Drainase Kelurahan yang dibangun	3.400	M3	3.128	M3	3.400	M3	3.400	M3	100%	-	6.528	M3	2	
						Luasan Pavingisasi Kelurahan yang dibangun	2.800	M2	2.470	M2	2.800	M2	2.800	M2	100%	-	5.27	M2	2	
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-		-		-		0%	32	Pokmas	32	Pokmas	-
					Program															
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa/Kelurahan yang Naik Status	45%		-		-		-		45%		0.45			
					Kegiatan :															
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Hasil Koorinasi dan Pengendalian Ketentaraman dan Ketertiban yang Ditindaklanjuti	45%								45%		0.45			
					Sub Kegiatan :															
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-		-		-		0%	16	laporan	16	laporan	
					Program															
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	68,75%		62,50%		68,75%		68,75%		75,00%		#VALUE!			
						Persentase desa yang menyusun APBDes dan LPPDes tepat waktu	68,75%		62,50%		68,75%		68,75%		75,00%		#VALUE!			
					Kegiatan :															
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase dokumen SOP Pelayanan Desa yang disusun	100	%	-		100	%	100	%	100%	100	%	200	%	2.00
						Persentase peserta sosialisasi yang sangat paham terhadap materi sosialisasi	80	%	-		80	%	80	%	100%	80	%	160	%	2.00

						Persentase laporan hasil fasilitasi pergantian perangkat desa yang ditindaklanjuti	100	%	-	100	%	100	%	100%	100	%	200	%	2.00
						Persentase laporan hasil fasilitasi LPPDes yang ditindak lanjuti	100	%	-	100	%	100	%	100%	100	%	200	%	2.00
						Persentase laporan pelaksanaan Musdes yang ditindaklanjuti	100	%	-	100	%	100	%	100%	100	%	200	%	2.00
						Persentase Laporan hasil Musrenbangcam yang ditindaklanjuti	100	%	-	100	%	100	%	100%	100	%	200	%	2.00
						Persentase desa yang menindaklanjuti hasil fasilitasi RKPDes dan DURKPDes	100	%	-	100	%	100	%	100%	100	%	200	%	2.00
						Persentase desa yang menindaklanjuti hasil fasilitasi APBDes	100	%	-	100	%	100	%	100%	100	%	200	%	2.00
						Persentase laporan hasil koordinasi Forpimcam yang ditindaklanjuti	100	%	-	100	%	100	%	100%	100	%	200	%	2.00
						Persentase peserta Paskibraka yang difasilitasi samapi dengan pelaksanaan Upacara HUT RI	100	%	-	100	%	100	%	100%	100	%	200	%	2.00
Sub Kegiatan :																			
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah peserta rapat koordinasi penyusunan SOP Pelayanan Desa	130	Orang	-	130	Orang	130	Orang	100%	-	130	Orang	1.00	
						Jumlah koordinasi dan konsultasi penyusunan SOP	12	Dokumen	-	12	Dokumen	12	Dokumen	100%	-	12	Dokumen	1.00	
						Jumlah peserta rapat koordinasi LPPDes	126	Orang	-	126	Orang	126	Orang	100%	-	126	Orang	1.00	
						Jumlah koordinasi dan konsultasi LPPDes yang ditindak lanjuti	12	Laporan	-	12	Laporan	12	Laporan	100%	-	12	Laporan	1.00	
						Jumlah Sosialisasi Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2	Kali	-	-	-	-	-	0%	-	0	-	-	
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			-					0%	1	Dokumen	1	Dokumen	0%
						Jumlah Laporan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			-					0%	12	Dokumen	12	Dokumen	0%
Sub Kegiatan :																			
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang diFasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	-	-	-	-	0%	2	Dokumen	2	Dokumen	-
						Jumlah koordinasi dan Evaluasi Penjaringan perangkat Daerah	-		-	-	-	-	-	0%	6	Laporan	6	Laporan	-
						Jumlah koordinasi ,Monitoring dan Evaluasi Penyusunan LPPDes	-		-	-	-	-	-	0%	12	Laporan	12	Laporan	-
						Jumlah Sosialisasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			12	Laporan				0%	12	Laporan	24	Laporan	-
						Jumlah monitoring dan evaluasi pergantian perangkat desa	2	Kali	1	Kali	2	Kali	2	Kali	100%	-	3	Kali	1.50

					Jumlah rapat koordinasi Konsultasi penyusunan LPPDes	1	Kali	1	Kali	1	Kali	1	Kali	100%	-	2	Kali	2.00	
					Jumlah koordinasi dan konsultasi Penyusunan LPPDes	12	Kali	12	Kali	12	Kali	12	Kali	100%	-	24	Kali	2.00	
					Jumlah Monitoring dan evaluasi penyusunan LPPDes	12	Kali	12	Kali	12	Kali	12	Kali	100%	-	24	Kali	2.00	
					Jumlah jumlah sosialisasi administrasi tata pemerintahan desa	5	Kali		Kali	5	Kali	5	Kali	100%	-		Kali	-	
					Jumlah pembinaan tentang administrasi tata pemerintahan desa	1	Kali		Kali	1	Kali	1	Kali	100%	-		Kali	-	
					jumlah laporan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	12	laporan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	100%	-	24	laporan	2.00	
					jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan tata pemerintah desa	12	laporan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	100%	-	24	laporan	2.00	
Sub Kegiatan :																			
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-		-		-		-	0%	4	Dokumen	4	Dokumen	-
						Jumlah Laporan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-		-		-		-	0%	12	Laporan	12	Laporan	-
Sub Kegiatan :																			
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		-		-		-	0%	1	Dokumen	1	Dokumen	-
						Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		-		-		-	0%	12	Laporan	12	Laporan	-

anggaran sebesar Rp. 7.915.247.110,00 terdiri dari 5 program, 12 kegiatan dan 32 sub kegiatan diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau minimal sama dengan Tahun 2022, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngawi adalah :

Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Indikator

Sasaran : Indeks Pelayanan Publik

Indikator Kinerja Utama :

- 1). Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) Perangkat Daerah
 - 2). Persentase Desa/Kelurahan Dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kategori MEMUASKAN
 - 3). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jenis Pelayanan:
 1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturanperundang-undangan.
 4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
 5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
 6. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan.
 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang
-

lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau Kelurahan.

Dalam upaya untuk mencapai sasaran maka direncanakan program dan kegiatan serta menetapkan indikator kinerja dan targetnya.

Indikator kinerja utama Kecamatan Ngawi adalah :

1. Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah

Untuk tahun 2024 ditetapkan target nilai LHE AKIP Kecamatan Ngawi sebesar 81,75 yang artinya terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/ Subkoordinator.

2. Persentase Desa/Kelurahan Dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kategori MEMUASKAN.

Dikatakan memuaskan apabila nilai IKM desa lebih atau sama dengan 93,73 Cara penghitungannya adalah jumlah desa di Kecamatan Ngawi dengan tingkat kepuasan pelayanan administrasi kategori memuaskan (nilai IKM \geq 80) dibagi jumlah desa di Kecamatan Ngawi. Untuk tahun 2024 ditetapkan target sebesar 93,75 atau 15 dari 12 desa 4 Kelurahan di Kecamatan Ngawi dengan tingkat kepuasan pelayanan administrasi kategori memuaskan (memperoleh nilai IKM \geq 80,00).

Untuk mengetahui berapa nilai IKM desa, maka perlu dilakukan survey kepuasan masyarakat. Oleh karena itu setiap tahun Kecamatan Ngawi selalu menganggarkan Jasa Konsultansi Penelitian untuk mengetahui nilai IKM Desa. Survey Kepuasan

Masyarakat dilaksanakan oleh pihak ketiga yang hasilnya berupa Laporan Survey Kepuasan Masyarakat untuk tiap-tiap desa di wilayah Kecamatan Ngawi.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan

Nilai IKM Kecamatan diperoleh dari hasil survey IKM di Kantor Kecamatan Ngawi. Untuk tahun 2024 ditetapkan target nilai IKM Kecamatan sebesar 80,60. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat di kantor kecamatan dilaksanakan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngawi. Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Ngawi dapat dilihat pada Lampiran tabel 2.2 pada halaman berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngawi
Kabupaten Ngawi

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (Thn n-2)	Tahun 2023 (Thn n-1)	Tahun 2024 (Thn n)	Tahun 2025 (Thn n+1)	Tahun 2022 (Thn n-2)	Tahun 2023 (Thn n-1)	Tahun 2024 (Thn n)	Tahun 2025 (Thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah			81,50	81,75	82,00	82,25	81,50	81,75	82,00	82,25	-
2	Presentase Desa/ Kelurahan dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kategori MEMUASKAN			87,50%	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Presentase Pemerintah Desa/ Kelurahan dengan Nilai > 80			-	81,12	85,12	100	-	81,12	85,12	100	-
4	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan			80.50	80.55	80.60	80.65	80.50	80.55	80.60	80.65	-

1. Masih rendahnya penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Kurang efektifnya fasilitasi penyusunan LPPDes
3. Masih kurangnya penyelenggaraan pembangunan di tingkat desa
4. Kurang efektifnya fasilitasi penyusunan APBDDes
5. Masih kurangnya sinergi lintas sektor dalam peningkatan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
6. Masih kurangnya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa
7. Masih kurangnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administratif kecamatan
8. Masih kurangnya efektifitas pelaksanaan fasilitasi kesejahteraan sosial masyarakat di wilayah kecamatan

Kecamatan Ngawi dengan kondisi geografis yang sebagian besar adalah hutan, hambatan yang paling mendasar adalah jalan akses, teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu sarana dan prasarana pendukung pelayanan juga relatif masih kecil. Dari sisi masyarakat, tingkat kesadaran untuk memperoleh pelayanan dan informasi juga masih rendah. Dalam masa pandemi Covid-19 ini juga sangat mempengaruhi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. Penerapan PPKM dan WFH sangat mempengaruhi terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Ngawi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tentunya berakibat juga pada tingkat pencapaian terhadap visi dan misi kepala daerah serta terhadap capaian program nasional.

2.3.3 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Melihat pada permasalahan dan hambatan di atas, maka diperlukan kerja yang lebih keras bagi perangkat daerah untuk bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Diperlukan lebih banyak sosialisasi ataupun penyampaian informasi kepada masyarakat tentang program-program pemerintah. Koordinasi dan sinergi dengan perangkat desa maupun lintas sektoral di wilayah Kecamatan Ngawi demi tersampainya layanan dan informasi kepada masyarakat juga perlu lebih ditingkatkan.

Selain itu dari sisi perangkat daerah dalam hal ini Kantor Kecamatan Ngawi apalagi di masa pandemi Covid-19 ini diperlukan terobosan atau inovasi baru dalam pelaksanaan aktivitas pelayanan kepada masyarakat.

2.3.4 Rekomendasi dalam perumusan program dan kegiatan prioritas

Melihat permasalahan dan hambatan serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Ngawi, maka diperlukan suatu formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, antara lain :

1. Pembinaan SDM Perangkat Desa
2. Fasilitasi penyusunan SOP Pelayanan Desa

3. Koordinasi dan fasilitasi antara kecamatan dengan desa dalam proses pergantian perangkat desa
4. Koordinasi dan evaluasi SDM Kecamatan terkait fasilitasi LPPDes
5. Koordinasi antara Kecamatan dan Desa dalam tahapan penyusunan dan evaluasi LPPDes
6. Fasilitasi dan koordinasi penyusunan RKPDes dan DURKP Desa
7. Koordinasi intensif antara Kecamatan dan desa dalam pemahaman kewenangan pembangunan di desa
8. Koordinasi dan evaluasi SDM Kecamatan terkait fasilitasi APBDes
9. Koordinasi antara Kecamatan dan Desa dalam tahapan penyusunan dan evaluasi APBDes
10. Koordinasi lintas sektor dalam peningkatan trantibum
11. Koordinasi intensif antara Kecamatan dan Desa dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa
12. Fasilitasi APBDes untuk pemenuhan alokasi anggaran untuk pemberdayaan masyarakat desa
13. Koordinasi Intensif internal dan lintas sektor dalam penyelesaian pelayanan kecamatan
14. Monitoring pelaksanaan verifikasi dan validasi data kesos
15. Koordinasi dan fasilitasi kegiatan kesos

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah

yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dimana tata cara penyusunannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Ngawi Tahun 2024. Hasil review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 disajikan pada tabel 2.4 pada halaman berikut :

					Persentase Pemerintah Desa yang Tata Kelola Pemerintahan "baik"	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Dokumen Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang disusun tepat waktu Persentase masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani Persentase Pemerintah Desa yang capaian Kinerja RPJMDes yang tercapai Persentase Pemerintah Desa yang memiliki Aparatur Desa Bersertifikat >70% Persentase Pemerintah Desa yang tidak memiliki Temuan Keuangan	Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	100 % 100 % 100 % 100 %	56.320.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen	100.000.000,00
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa											
					Persentase Pemerintah Desa yang Tata Kelola Pemerintahan "baik"	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Dokumen Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang disusun tepat waktu Persentase masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani Persentase Pemerintah Desa yang capaian Kinerja RPJMDes yang tercapai Persentase Pemerintah Desa yang memiliki Aparatur Desa Bersertifikat >70% Persentase Pemerintah Desa yang tidak memiliki Temuan Keuangan	Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/Desa	100 %	4 Dokumen	100 % 100 % 100 % 100 %	8.095.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4 Dokumen	86.759.000,00
7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											

					Persentase Pemerintah Desa yang Tata Kelola Pemerintahan "baik"	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Dokumen Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang disusun tepat waktu Persentase masalah Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani Persentase Pemerintah Desa yang capaian Kinerja RPJMDes yang tercapai Persentase Pemerintah Desa yang memiliki Aparatur Desa Bersertifikat >70% Persentase Pemerintah Desa yang tidak memiliki Temuan Keuangan	Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 % 100 % 100 % 100 %	12.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	70.000.000,00
X					NON URUSAN							6.759.181.138,00				9.140.000.285,00
X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							6.759.181.138,00				9.140.000.285,00
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							6.759.181.138,00				9.140.000.285,00
X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							6.000.000,00				72.500.000,00
X	XX	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
					Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/Desa	100 %	9 Dokumen	100 %	1.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	25.000.000,00
X	XX	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
					Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	1.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.500.000,00
X	XX	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
					Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	1.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6.500.000,00

X	XX	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
					Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	100 %	1.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	6.500.000,00	
X	XX	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
					Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	100 %	1.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	6.000.000,00	
X	XX	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
					Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/Desa	100 %	7 Laporan	100 %	1.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	25.000.000,00	
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								6.500.736.138,00					7.431.700.285,00
X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
					Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/Desa	100 %	1904 Orang/bulan	100 %	6.496.736.138,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1904 Orang/bulan	7.381.700.285,00	
X	XX	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
					Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	2.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25.000.000,00	
X	XX	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
					Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/Desa	100 %	50 Laporan	100 %	2.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	50 Laporan	25.000.000,00	

X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							35.000.920,00					456.000.000,00	
X	XX	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
					Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	100 %	4.987.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	56.000.000,00	
X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
					Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/Desa	100 %	2 Paket	100 %	11.479.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	135.000.000,00	
X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
					Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/Desa	100 %	4 Paket	100 %	3.302.420,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	165.000.000,00	
X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
					Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/Desa	100 %	2 Paket	100 %	4.012.500,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	60.000.000,00	
X	XX	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
					Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	1.200.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.000.000,00	
X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
					Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/Desa	100 %	5 Laporan	100 %	10.020.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	35.000.000,00	
X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								0,00					700.800.000,00
X	XX	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													
					Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan sesuai dengan kebutuhan dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/Desa	100 %	8 Unit	100 %	0,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	175.000.000,00	
X	XX	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

					Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan sesuai dengan kebutuhan dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/Desa	100 %	29 Unit	100 %	0,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	29 Unit	275.800.000,00
X	XX	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
					Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan sesuai dengan kebutuhan dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/Desa	100 %	19 Unit	100 %	0,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	19 Unit	150.000.000,00
X	XX	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
					Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan sesuai dengan kebutuhan dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/Desa	100 %	8 Unit	100 %	0,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	100.000.000,00
X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
X	XX	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
					Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/Desa	100 %	65 Laporan	100 %	3.600.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	65 Laporan	9.000.000,00
X	XX	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
					Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/Desa	100 %	180 Laporan	100 %	79.374.080,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	180 Laporan	95.000.000,00
X	XX	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
					Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/Desa	100 %	108 Laporan	100 %	72.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	108 Laporan	200.000.000,00
X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												

					Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/Desa	100 %	48 Laporan	100 %	34.920.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	80.000.000,00		
X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							27.550.000,00					95.000.000,00	
X	XX	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
					Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/Desa	100 %	37 Unit	100 %	22.300.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	45.000.000,00		
X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
					Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/Desa	100 %	21 Unit	100 %	5.250.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	50.000.000,00		
TOTAL												7.666.736.138,00					14.760.700.085,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat diserap melalui mekanisme musyawarah rencana pembangunan. Musyawarah rencana pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah. Musrenbang mempunyai tujuan untuk mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah Kabupaten Ngawi pada musrenbang tingkat kecamatan dan/atau sebelum musrenbang tingkat kabupaten dilaksanakan dan untuk mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Ngawi.

- Masukan/bahan musrenbang dari masyarakat adalah berupa usulan gagasan/ide melalui forum perencanaan pembangunan daerah yang sudah disusun secara terstruktur dan diselaraskan dengan skala prioritas daerah.
- Masukan/bahan musrenbang dari desa/kelurahan berupa Berita Acara Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan. Hasil usulan program dan kegiatan pembangunan daerah yang perlu dibiayai APBD Kabupaten sesuai dengan hasil yang sudah disepakati.
- Masukan/bahan musrenbang dari kecamatan adalah berupa Berita Acara Hasil Musrenbang tingkat kecamatan yang diselenggarakan pada bulan Februari. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan yang sudah dimutakhirkan sesuai hasil Berita Acara Musrenbang tingkat Kecamatan dan diselaraskan dengan skala prioritas kegiatan

serta sudah dipilah menurut Perangkat Daerah dan sumber pendanaannya.

Program dan kegiatan yang diusulkan dalam rencana kerja ini disusun dengan mengacu pada visi dan misi Kabupaten Ngawi dengan memperhatikan keadaan dan kondisi wilayah Kecamatan Ngawi. Rencana Kerja Kecamatan Ngawi yang didalamnya memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1(satu) tahun berjalan disusun sebagai konsekuensi dari Rencana Strategis 5 (lima) tahun yang diarahkan untuk mewujudkan suatu pelayanan optimal bagi aparatur dalam rangka pembentukan sumber daya aparatur guna memiliki kompetensi dan profesionalisme dibidang tugasnya masing-masing dan lebih luasnya kepada masyarakat di Kecamatan Ngawi agar terbentuk manajemen tatanan pemerintahan yang baik. Dengan demikian program yang nantinya ditingkatkan melalui Rencana Kerja benar-benar diarahkan pada penetapan langkah-langkah kebijakan melalui kegiatan operasional yang disesuaikan dengan kebutuhan prioritas program dan kegiatan mendukung tugas-tugas pemerintahan dalam pembangunan Kecamatan Ngawi dengan target dan sasaran yang efisien, efektif dan terukur.

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dapat dilihat pada tabel 2.5 pada halaman berikut :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Ngawi

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	#BP Bantuan Bahan Pangan (Beras, Minyak goreng, Gula, Sarden) untuk desa rawan pangan	Ds. Banyuurip, Kab. Ngawi			
2	#BP Bantuan Beras	Ds. Banyuurip, Kab. Ngawi			
3	#BP Pelatihan Pengembangan SDM & Produk Ekraf	Desa Beran, Kab. Ngawi			
4	#BP Pelatihan Makanan	Desa Beran, Kab. Ngawi			
5	#REG Dana Pembinaan Prestasi Olahraga	Jl. Branjangan no.27 Rt.01 Rw.01 Beran , Kab. Ngawi			
6	#BP Pembinaan Pasar Desa	Pasar Desa Grudo, Kab. Ngawi			
7	#BK Pembinaan kelompok Organisasi Kepemudaan	Jl. Sukarno Nomor 7, Kab. Ngawi			
8	#BK Pembinaan kelompok Organisasi Kepemudaan	Grudo, Kab. Ngawi			
9	#BK Fasilitasi Peningkatan Usaha	Dusun Pojok Rt 03 Rw 01, Desa Grudo, Kab. Ngawi			
10	#BP Bantuan hand tractor	Dsn Kandangan II, Kab. Ngawi			
11	#BP Bantuan Sarana Bola Sepak Bola	RT04 RW08 Dsn. Nglarangan, Kab. Ngawi			
12	#BP Pelatihan kewirausahaan pemuda	Desa Karangasri, Kab. Ngawi			
13	#BP Pengadaan APE Luar Ruang (ayunan, Jungkitan, Prosotan, dll)	Dusun Joho RT/RW 02/08, Kab. Ngawi			
14	#BP Bimtek Pengembangan SDM (P3DN, K3, Managerial)	Dusun Sadang RT/RW 01/06, Kab. Ngawi			
15	#BP Bantuan sarana produksi pertanian organik	Desa Kartoharjo, Kab. Ngawi			
16	#BP Pelatihan kewirausahaan pemuda	Desa Kartoharjo, Kab. Ngawi			
17	#BP Pengembangan Kawasan Agropolitan Budidaya (Ikan Hias, Gurami, Patin, Nila,lele, Udang)	dusun kerek rt 02 rw 04 , Kab. Ngawi			
18	#BK Bantuan Hand Tractor	dusun napel,kerek & poncol rt 01/01-02/06, Kab. Ngawi			
19	#BP Pelatihan kewirausahaan pemuda	kelurahan ketangi, Kab. Ngawi			
20	#BP Pelatihan Makanan	kelurahan ketangi, Kab. Ngawi			
21	#BP Bantuan Combine Harvester Besar	Desa Mangunharjo, Kab. Ngawi			
22	#BP Pelatihan Pengembangan SDM & Produk Ekraf	Desa Mangunharjo, Kab. Ngawi			
23	#BP Bimtek Pengembangan SDM (P3DN, K3, Managerial)	Jl Brawiawa No 29, Kab. Ngawi			
24	#BK Fasilitasi Usaha Koperasi	Jl Brawiawa No 29, Kab. Ngawi			
25	#BK Fasilitasi Peningkatan Usaha	Jl Brawiawa No 29, Kab. Ngawi			
26	#REG Dana Operasional Kwarcab Pramuka	JL. YOS SUDARSO NO. 63 NGAWI, Kab. Ngawi			
27	#REG Dana Operasional Kwarcab Pramuka	Jl. Yos Sudarso No. 63 Ngawi, Kab. Ngawi			
28	#BP Pelatihan Makanan	Dusun Ngawi RT 01 RW 04, Kab. Ngawi			
29	#BP Pelatihan yang Berbasis Masyarakat (Pelatihan Mamin Aneka kue)	Kelurahan Pelem Jl. Munginsidi No. 29 Ngawi, Kab. Ngawi, Ngawi, Pelem, Kab. Ngawi			
30	#BP Jalan Usaha Tani untuk tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura	Dusun Ngrambang Desa Watualang, Kab. Ngawi			
31	#BP Bantuan Sarana Bola Volly	Desa Watualang, Kab. Ngawi			
32	#BP Jalan Usaha Tani untuk tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura	Dusun Gemarang Barat dan Dusun Bogoharjo, Kab. Ngawi			
33	#BP Pembangunan Sumur Dalam Sumber tenaga Listrik PLN	Ds. Banyuurip, Kab. Ngawi			
34	#BP Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Ds. Banyuurip, Kab. Ngawi			
35	#BP Pembangunan Sumur Dalam Sumber tenaga Listrik PLN	Desa Beran, Kab. Ngawi			
36	#BP Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Beran, Kab. Ngawi			
37	#BP Pembangunan Sumur Dalam Sumber tenaga Listrik PLN	Mojoorejo, Kab. Ngawi			
38	#BP Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Dusun Desan, Rt 02 Rw 12 , Kab. Ngawi			
39	#BP Pembangunan Penerangan Jalan Umum	RT 04 RW 08 Dusun Nglarangan, Kab. Ngawi			
40	#BP Pembangunan Paving Jalan Lingkungan Kelurahan	RT. 18 RW. 06 gg. Cerme Lingkungan Sidorejo, Kab. Ngawi			
41	#BP Pembangunan Saluran/Drainase Jalan Lingkungan Kelurahan	RT.07 RW.04 Lingkungan Tanjungrejo Kel. Karangtengah, Kab. Ngawi			
42	#BP Pembangunan Saluran/Drainase Jalan Lingkungan Kelurahan	rt.05 rw.03 lingkungan porworejo kel. karangtengah, Kab. Ngawi			
43	#BP Pembangunan Sumur Dalam Sumber tenaga Listrik PLN	Dusun Bulung, Desa Kartoharjo, Kab. Ngawi			
44	#BP Pembangunan Paving Jalan Lingkungan Kelurahan	jalan kyai mojo gang nongko lingkungan krajan, Kab. Ngawi			
45	#BP Pembangunan Paving Jalan Lingkungan Kelurahan	lingkungan sidomulyo gang wijaya kusuma, Kab. Ngawi			
46	#BP Pembangunan Saluran/Drainase Jalan Lingkungan Kelurahan	jalan kyai mojo lingkungan krajan, Kab. Ngawi			
47	#BP Pembangunan Paving Jalan Lingkungan Kelurahan	jalan patinus, Kab. Ngawi			
48	#BP Pembangunan Paving Jalan Lingkungan Kelurahan	Gg Indragiri Lingkungan Karanggeneng RT 002 RW 002 , Kab. Ngawi			
49	#BP Pembangunan Saluran/Drainase Jalan Lingkungan Kelurahan	Jl PB Sudirman Gg Dahlia 3 RT 005 RW 002, Kab. Ngawi			
50	#BP Pembangunan Paving Jalan Lingkungan Kelurahan	Rt. 03 Rw. 01 gang makam kelurahan pelem, Kab. Ngawi, Ngawi, Pelem, Kab. Ngawi, Ngawi, Pelem, Kab. Ngawi			
51	#BP Pembangunan Saluran/Drainase Jalan Lingkungan Kelurahan	Jl. Ronggolawe Rt 08 Rw. 02 Kelurahan Pelem, Kab. Ngawi, Ngawi, Pelem, Kab. Ngawi, Ngawi, Pelem, Kab. Ngawi			
52	#BP Pembangunan Saluran/Drainase Jalan Lingkungan Kelurahan	Rt.01 Rw. 01 Gang Kaweng kelurahan pelem, Kab. Ngawi, Ngawi, Pelem, Kab. Ngawi			
53	#BP Pengadaan APE Dalam Ruang	Ds. Banyuurip, Kab. Ngawi			
54	#BKD Kantor Desa	Ds. Banyuurip, Kab. Ngawi			
55	#BK Bantuan Sarana dan Prasarana Posyandu (Tripod, Sarung Timbang, Celana Timbang, Dacin, Register SIP)	Dsn. Gunung Kendil Rt. 02 Rw. 03 Ds. Banyuurip, Kab. Ngawi			
56	#BKD Pembangunan Saluran/Drainase Jalan Poros Desa	Jl. Baiturrahman Desa Beran, Kab. Ngawi			
57	#BKD Kantor Desa	Desa Beran, Kab. Ngawi			
58	#BK Biaya kegiatan keagamaan	Dusun Belukan, Desa Beran, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi			
59	#BK Biaya kegiatan keagamaan	Jl. Jekit RT.004 RW.001 Dsn Belukan Desa Beran Kec. Ngawi, Kab. Ngawi			
60	#BK Biaya kegiatan keagamaan	Jl. Ahmad Yani No. 635, Kab. Ngawi			
61	#BK BOSDA/MADIN	Den Wareng, Kab. Ngawi			
62	#BK Rehab Sedang Berat Gedung PAUD	Jl. Sunan Kalijogo Pojok RT 03 RW 01 Beran Ngawi. 63216, Kab. Ngawi			
63	#REG OPERASIONAL dan PELAKSANAAN PROGRAM KERJA LEMBAGA/ORGANISASI di BIDANG KESEHATAN	Jl. S. Parman 25A RT.003 RW.003 Dusun Balong, Kab. Ngawi			
64	#REG Bantuan keuangan untuk Parpol	Jl.Raya Ngawi-Solo Ruko Ngawi Square No.14 Kec.Ngawi Kab.Ngawi, Kab. Ngawi			
65	#REG Bantuan keuangan untuk Parpol	Jl.Dr.Radjiman Desa Grudo Kec.Ngawi Kab.Ngawi, Kab. Ngawi			
66	#BKD SARANA OLAHRAGA	Dusun Brangol, Kab. Ngawi			
67	#BK Biaya kegiatan keagamaan	Jalan Raden mas Suryo, Nronggi, Kab. Ngawi			
68	#BKD Peningkatan Jalan Desa	Gg melati Dusun Cupo RT 004 RW 003, Kab. Ngawi			
69	#BKD Peningkatan Jalan Desa	Dusun Nronggi RT 001 RW 001, Kab. Ngawi			
70	#BK BOSDA/MADIN	Jalan Cendrawasih No. 48A Grudo Ngawi, Kab. Ngawi			
71	#BK Pavingisasi Halaman SMP	Jalan Cendrawasih No.48 A Grudo Ngawi, Kab. Ngawi			
72	#REG Bantuan keuangan untuk Parpol	Jl.Panjaitan No.13 Jrubong Selatan RT 002 RW 015 Desa Jururejo Kec.Ngawi Kab.Ngawi, Kab. Ngawi			
73	#BKD Penahan Tanah	Dusun Mardiasri , Kab. Ngawi			
74	#BKD Badan Usaha Milik Desa	Jl. Siliwangi No.90 Desa Jururejo, Kab. Ngawi			
75	#BKD Kantor Desa	Desa Jururejo, Kab. Ngawi			
76	#BKD PAUD-TK-Sekolah	Desa Jururejo, Kab. Ngawi			
77	#BKD DRAINASE	Jl. Puntodewo Dusun Pandansari Utara RT. 003 RW. 005 , Kab. Ngawi			
78	#BKD Drainase	Pertum Loka Wiyata RT. 002 RW. 010 Dusun Padas, Kab. Ngawi			
79	#BK BOSDA/MADIN	Jl Raya Paron - Ngawi, Kab. Ngawi			
80	#BK BOSDA/MADIN	il Panaitan 20 B, Kab. Ngawi			
81	#BK BOSDA/MADIN	Jl.Panjaitan 20 B Ngawi, Kab. Ngawi			
82	#BK BOSDA/MADIN	il panaitan 20 b, Kab. Ngawi			
83	#REG Bantuan keuangan untuk Parpol	Jl Siliwangi no 01 Jrubong Desa Jururejo kode pos 63215, Kab. Ngawi			
84	#REG Bantuan Hibah Pengadilan Negeri	Jl PB Sudirman No 97 Desa Jururejo Kec Ngawi Kab Ngawi, Kab. Ngawi			
85	#BK BOSDA/MADIN	Jl.Panjaitan 20 B Ngawi, Kab. Ngawi			

86	#BP Rehabilitasi/Renovasi Pustu	samping Kantor Desa Kandangan RT 03 RW 01 Dusun Kandangan 1, Kab. Ngawi		
87	#BP posyandu jiwa	Dusun Sidomulyo RT 01 RW 05, Kab. Ngawi		
88	#BKD Pembangunan Jalan Poros Desa	jalan poros desa kandangan, Dusun plosorejo-dusun kandangan 1, Kab. Ngawi		
89	#BK Pembangunan sarana dan prasarana tempat ibadah	Dusun Kandangan II RT.002 RW.004, Kab. Ngawi		
90	#BK Biaya kegiatan keagamaan	Dsn. KANDANGAN II, Kab. Ngawi		
91	#BKD Pembangunan Jalan Poros Desa	Dusun Desan Rt 03 Rw 11, Kab. Ngawi		
92	#BKD Pembangunan Jalan Poros Desa	Dusun Karangtejo Rt 01 Rw 08, Kab. Ngawi		
93	#BKD Pembangunan Jalan Poros Desa	Dusun Karangtejo Rt 03 Rw 08, Kab. Ngawi		
94	#BKD Pembangunan Jalan Poros Desa	Dusun Sidomulyo RT 4 RW 6, Kab. Ngawi		
95	#BKD Peningkatan Jalan Desa	Dusun Sidomulyo, Sale Kidul Rt 03 RT 05, Kab. Ngawi		
96	#BKD Pembangunan Jalan Poros Desa	Dusun Sidomulyo Rt 03 Rw 06, Kab. Ngawi		
97	#BKD Pembangunan Jalan Poros Desa	Dusun Kandangan 1 Rt 01 Rw 02, Kab. Ngawi		
98	#BKD Pembangunan Jalan Poros Desa	Dusun Kandangan 2 Rt 02 RW 03, Kab. Ngawi		
99	#BKD Pembangunan Jalan Poros Desa	Dusun Kandangan 1 RT 03 RW 01, Kab. Ngawi		
100	#BKD Pembangunan Jalan Poros Desa	Dusun Plosorejo Rt 01 Rw 09, Kab. Ngawi		
101	#BKD Pembangunan Jalan Poros Desa	Dusun Desan Rt 03 RW 12, Kab. Ngawi		
102	#BP Bantuan Sarana dan Prasarana Posyandu (Tripod, Sarung Timbang, Celana Timbang, Dacin, Register SIP)	Desa Karangasri, Kab. Ngawi		
103	#BKD Kantor Desa	Jl. Supriyadi no.30 Desa Karangasri, Kab. Ngawi		
104	#BKD Pembangunan Jalan Poros Desa	Jl.Wahid Hasyim Dsn. Nglarangan RT.01 RW.08 , Kab. Ngawi		
105	#BK BOSDA/MADIN	Jl. Raya Ngawi-Cepu Km 01 Karangasri , Kab. Ngawi		
106	#BK BOSDA/MADIN	Jl. Raya Ngawi - Cepu Km 01 , Kab. Ngawi		
107	#BK Pembangunan Ruang Kelas SMP	Jl. Raya Ngawi - Cepu KM 01 Karangasri, Kab. Ngawi		
108	#BK Biaya kegiatan keagamaan	Jl. Raya Ngawi - Cepu Km 01 Karangasri, Kab. Ngawi		
109	#BK BOSDA/MADIN	Jl. Raya Ngawi - Cepu KM 01 Karangasri, Kab. Ngawi		
110	#BP Pembangunan Tangki Septik Individual	Desa Karangasri, Kab. Ngawi		
111	#BKD Drainase	RT. 06 RW. 03 Lingkungan Purworejo , Kab. Ngawi		
112	#BKD Drainase	RT. 13 RW. 05 Ngadirejo, Kab. Ngawi		
113	#BKD Drainase	RT. 15 RW. 05 Lingkungan Ngadirejo, Kab. Ngawi		
114	#REG Bantuan Hibah Badan/Lembaga/Ormas	Jl Untung Suropati No.48 Ngawi, Kab. Ngawi		
115	#BKD Polindes-Poskesdes	Dusun Prandon RT/RW 02/02, Kab. Ngawi		
116	#BP Peningkatan SDM Koperasi	Desa Karangtengah Prandon, Kab. Ngawi		
117	#BKD Penerangan Jalan	Dusun Prandon RT/RW 02/02, Kab. Ngawi		
118	#BP Pengadaan Alat Kesenian (yang mendukung proses belajar mengajar siswa)	Jalan Garuda No. 05, Kab. Ngawi		
119	#BKD Pembangunan Talud Jalan Poros Desa	Dusun Prandon RT/RW 02/02 , Kab. Ngawi		
120	#BK BOSDA/MADIN	Dsn. Cabean Rt 03 Rw 01, Kab. Ngawi		
121	#BKD Kantor Desa	Jalan Supriyadi km. 2 Ngawi, Kab. Ngawi		
122	#BKD Pembangunan Saluran/Drainase Jalan Poros Desa	Dusun Bulung, Desa Kartoharjo s/d Desa Karangasri, Kab. Ngawi		
123	#BKD Pembangunan Saluran/Drainase Jalan Poros Desa	Dusun Ketangi Lor RT.01 RW.02, Desa Kartoharjo, Kab. Ngawi		
124	#BK BOSDA/MADIN	Jl.Ir Soekarno Km.7 Ringroad Timur Ngawi Ds.Kartoharjo kec.Ngawi Kab.Ngawi Jawa Timur, Kab. Ngawi		
125	#BK Pembangunan Ruang Perpustakaan SD	dusun kerek rt 01 rw 03, Kab. Ngawi		
126	#BKD Kantor Desa	dusun kerek rt 01 rw 03 , Kab. Ngawi		
127	#BK Bantuan Sarana dan Prasarana Posyandu (Tripod, Sarung Timbang, Celana Timbang, Dacin, Register SIP)	dusun kerek rt 01 rw 03 dan dusun poncol rt 01 rw 05, Kab. Ngawi		
128	#BKD Pembangunan Saluran/Drainase Jalan Poros Desa	dusun napel rt 001 rw 001, Kab. Ngawi		
129	#BK Pembangunan sarana dan prasarana tempat ibadah	Jl. Teuku Umar 12, Kab. Ngawi		
130	#REG OPERASIONAL dan PELAKSANAAN PROGRAM KERJA LEMBAGA/ORGANISASI di BIDANG KESEHATAN	Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 16 , Kab. Ngawi		
131	#BP Pengadaan APE Luar Ruangan (ayunan, Jungkitan, Prosotan, dll)	kelurahan ketangi, Kab. Ngawi		
132	#BP Pengadaan APE Luar Ruangan (ayunan, Jungkitan, Prosotan, dll)	kelurahan ketangi, Kab. Ngawi		
133	#REG Bantuan Hibah TNI	Jl Jaksa Agung Suprpto No 1, Cabean Kidul, Ketangi, Kec Ngawi, Kab Ngawi, Kab. Ngawi		
134	#BKD Pembangunan Jalan Poros Desa	Dusun Nguwin - Dusun Pendem, Kab. Ngawi		
135	#BK Pembangunan sarana dan prasarana tempat ibadah	Dusun Krawut RT 002 RW 012, Kab. Ngawi		
136	#BK BOSDA/MADIN	Jl.Supriyadi KM 08, Munggur, Mangunharjo, Kab. Ngawi		
137	#BK BOSDA/MADIN	Jln. supriyadi , Kab. Ngawi		
138	#BK BOSDA/MADIN	Jln Supriyadi , Kab. Ngawi		
139	#BK Pengadaan APE Luar Ruangan (ayunan, Jungkitan, Prosotan, dll)	JL. Supriyadi Km. 08 Dusun Munggur Desa Mangunharjo Kecamatan Ngawi Kab. Ngawi, Kab. Ngawi		
140	#REG Bantuan Hibah Badan/Lembaga/Ormas	Perum Bumi Kurnia Resident, Jl. KH. Ahmad Dahlan Block C No 1, Margomulyo, Kab. Ngawi		
141	#BP Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	Jl Brawijaya No 29, Kab. Ngawi		
142	#REG Bantuan keuangan untuk Parpol	Jl.KH.A.Dahlan No.36 Kelurahan Margomulyo , Kab. Ngawi		
143	#REG Bantuan keuangan untuk Parpol	Jl.Mh.thamrin no.35/16 Rt 001 RW 004 Kelurahan Margomulyo Kec.Ngawi Kab.Ngawi , Kab. Ngawi		
144	#REG Bantuan keuangan untuk Parpol	Jl.Yos Sudarso 35 B Kelurahan Margomulyo Kec.Ngawi Kab.Ngawi, Kab. Ngawi		
145	#REG Bantuan keuangan untuk Parpol	Jl.M.H Thamrin No.09 RT 001/004 RW 003 Kec.Ngawi Kab.Ngawi, Kab. Ngawi		
146	#REG Bantuan keuangan untuk Parpol	Jl.Yos Sudarso No.2A Kelurahan Margomulyo Kec.Ngawi Kab.Ngawi, Kab. Ngawi		
147	#REG Bantuan Hibah Badan/Lembaga/Ormas	Bumi Kurnia Residence Jl. KH. Ahmad Dahlan Block C. No 1, Kab. Ngawi		
148	#BK BOSDA/MADIN	JL. KH. Ahmad Dahlan No. 26 Ngawi, Kab. Ngawi		
149	#BK Biaya kegiatan keagamaan	Jl Brawijaya No 28 B Margomulyo Kode Pos 63217, Kab. Ngawi		
150	#REG Bantuan Hibah Badan/Lembaga/Ormas	JLN YOS SUDARSO 63, KEL MARGOMULYO, KEC. NGAWI , Kab. Ngawi		
151	#REG Bantuan Hibah Badan/Lembaga/Ormas	Jln. Imam Bonjol No. 8 , Kab. Ngawi		
152	#REG Bantuan Hibah Badan/Lembaga/Ormas	Jl. Yos Sudarso, No 23 RT. 07 RW. 03 Ngawi, Kab. Ngawi		
153	#REG Bantuan keuangan untuk Parpol	Jl Kartini No 17 Kode Pos 63217 Kelurahan Margomulyo Kec Ngawi Kab Ngawi, Kab. Ngawi		
154	#BK Hibah Bidang Kebudayaan	Jl. Yos Sudarso (Gedung PKK Kab. Ngawi), Kab. Ngawi		
155	#REG Bantuan Hibah Badan/Lembaga/Ormas	Jl Yos Sudarso No. 2b Kel Margomulyo, Kec Ngawi, Kab Ngawi, Kab. Ngawi		
156	#BKD Pembangunan Jalan Poros Desa	Desa ngawi, Kab. Ngawi		
157	#BKD Pembangunan Saluran/Drainase Jalan Poros Desa	Dusun banjar RT 01 RW 06, Kab. Ngawi		
158	#BK BOSDA/MADIN	JALAN BASUKI RAHMAT NO. 77 NGAWI, Kab. Ngawi		
159	#BK BOSDA/MADIN	Dsn Cabean, Kab. Ngawi		
160	#BKD Drainase	Rt. 01 Rw. 01 jalan ke makam bagian Selatan Kelurahan Pelem, Kab. Ngawi, Ngawi, , Kab. Ngawi		
161	#BKD Kantor Desa	Jl. Raya Ngawi - Solo Km. 4 Desa watualang Kecamatan ngawi Kabupaten Ngawi, Kab. Ngawi		
162	#BP Bantuan Sarana dan Prasarana Posyandu (Tripod, Sarung Timbang, Celana Timbang, Dacin, Register SIP)	Desa Watualang, Kab. Ngawi		
163	#BKD Penerangan Jalan	Ds. Watualang, Kab. Ngawi		
164	#BKD Jalan Desa	Dusun Krajan Utara RT 02 RW 16, Kab. Ngawi		

Adapun Tujuan dan Sasaran yang Ingin dicapai dalam Rencana Kerja Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi tahun 2024 untuk Program dan Kegiatan di tahun 2024 sebagaimana Tabel 2.3 Pada Halaman Berikut :

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas. Landasan keputusan yang diambil dalam sebuah kebijakan adalah mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efektif dan efisien sejalan dengan misi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik.

Prioritas dalam sebuah kebijakan tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan melalui pencapaian strategi pembangunan. Kebijakan, strategi, dan prioritas program pembangunan daerah tersebut menjadi acuan bagi Kecamatan Ngawi.

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional/Daerah Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka mengukur kinerja setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Kebijakan Nasional. Kecamatan Ngawi merupakan salah satu Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Ngawi, maka penelaahan dilakukan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Ngawi yang terkait secara langsung dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ngawi.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja, maka Kecamatan Ngawi dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan Ngawi. Dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Ngawi sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi dalam rangka kerangka prioritas untuk fokus kearah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) mutlak untuk disusun sebagai arah pelaksanaan program selama waktu 1 (satu) tahun dan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Karena itu penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ngawi Tahun 2024 bertujuan mengoptimalkan kinerja program dan kegiatan sebagai langkah dan strategi untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Ngawi yang efisien dan efektif.

Tujuan Strategis Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan Tujuan Strategis Pembangunan Kabupaten. Tujuan Renja Perangkat Daerah didapatkan dengan cara mensinkronkan tujuan strategis

pembangunan kabupaten yang sesuai dengan Pelayanan Perangkat Daerah dengan isu-isu strategis dan usulan masyarakat.

Sasaran strategis Renja Perangkat Daerah juga harus selaras dengan Sasaran Strategis Pembangunan Kabupaten. Sasaran strategis Renja Perangkat Daerah didapatkan dengan cara mensinkronkan sasaran strategis pembangunan kabupaten yang sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah dengan isu-isu strategis dan usulan masyarakat.

Sasaran dalam Rencana Kerja disajikan bersama indikator kerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya kegiatan disajikan mengacu pada program yang telah disusun sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) merupakan rincian sistematis dari program yang akan dilaksanakan.

Mengacu kepada visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Ngawi periode Tahun 2021 – 2026 yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2021 – 2026, Kecamatan Ngawi mengampu Misi ke- 3 yaitu :

Visi : SEMESTA BERENCANA “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlaq, makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI”

Misi 3: Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima.

TABEL 2.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat daerah
Kecamatan Ngawi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2024	2025	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	82.00	82.25	82.5
		Meningkatnya Kualitas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	82.00	82.25	82.5
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik	5.15	5.25	5.40
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	80.60	80.65	80.70
			Persentase Pemerintah Desa dengan Nilai IKM >80	50.00	50.00	58.33

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dalam rangka mencapai sasaran maka dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang ditunjang dengan pendanaan/anggaran yang besarnya disesuaikan dengan jenis dan dampak kegiatan kepada kesejahteraan masyarakat serta kemampuan APBD Kabupaten Ngawi untuk mendanai.

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yang akan dikelola Kantor Kecamatan Ngawi selama 1 tahun ke depan antara lain:

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan Kecamatan Ngawi secara umum maupun keseluruhan diarahkan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah dan merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sesuai dengan fungsi/urusan yang menjadi kewenangannya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

2. Pencapaian SDGs

Konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan rangkaian target yang bisa diaplikasikan secara universal serta dapat diukur dalam menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan; (1) lingkungan, (2) sosial, dan (3) ekonomi. Rumusan program dan kegiatan Kecamatan Ngawi dalam Renja Tahun 2024 diharapkan dapat berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam pencapaian sasaran, target dan indikator SDGs

sesuai dengan tugas, fungsi dan kapasitasnya.

3. Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Pusat dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, Tempat Berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

4. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring,

pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Ngawi diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

5. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Dalam rangka Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah, dalam rumusan program dan kegiatan Tahun 2024, Kecamatan Ngawi mengusung Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa sebagai upaya menggali/mendorong potensi ekonomi yang ada di wilayah Kecamatan Ngawi.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain meliputi :

1. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Ngawi Tahun 2024 adalah 5 (Lima) Program, 15 (lima belas) Kegiatan dan 40 (empat puluh) Sub Kegiatan

2. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Ngawi sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Ngawi, yang meliputi semua Desa yang ada di Kecamatan Ngawi dan juga Kantor Kecamatan Ngawi , beberapa lokasi luar daerah serta di Wilayah Kabupaten Ngawi.

3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 14.440.766.646,00 (Empat Belas Milyar Empat Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Ngawi (APBDKAB).

Rumusan program dan kegiatan pada Rancangan Renja 2024 adalah sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. Program dan kegiatan merupakan rencana aksi dari Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Penyusunan program dan kegiatan dalam Rancangan Renja Kecamatan Ngawi mengacu pada program dan kegiatan yang telah dirumuskan di Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024.

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Ngawi bersumber pada dana APBD Kabupaten Ngawi. Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Ngawi adalah sebagaimana tabel 4.1

Tabel 4.1

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kecamatan Kecamatan Tahun 2024

dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Ngawi

KECAMATAN NGAWI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
-1												
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun		0,00			555.000.000,00	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu		0,00			130.000.000,00	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/Desa	0 Paket	0,00	PENDAPATAN TRANSFER	0 Paket	130.000.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0,00			175.000.000,00	
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/Desa	100 %	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	175.000.000,00
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		0 Unit			0 Unit	
						Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan sesuai dengan kebutuhan dalam setahun		100%			100%	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0,00			250.000.000,00	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/Desa	100 %	0,00	PENDAPATAN TRANSFER	100 %	200.000.000,00
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit			0 Unit	
						Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun		100%			100%	
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/Desa	100 %	0,00	PENDAPATAN TRANSFER	100 %	50.000.000,00
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		4 Unit			4 Unit	
						Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun		100%			100%	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			13.560.000,00				463.250.000,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			6.552.500,00				303.250.000,00
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase aspek penilaian IKM Kecamatan dalam kategori minimal baik	Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/Desa	75 %	6.552.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	75 %	303.250.000,00
						Persentase penyelenggaraan urusan kecamatan sesuai standart		90%			90%	

					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		12 Laporan				12 Laporan	
					Persentase Penyelenggaraan Layanan Administrasi sesuai standar		100%				100%	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			7.007.500,00				160.000.000,00
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase aspek penilaian IKM Kecamatan dalam kategori minimal baik	Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/Desa	75 %	7.007.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	75 %	160.000.000,00
					Persentase Penyelenggaraan urusan Kecamatan sesuai standar			90%			90%	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			12 Laporan			12 Laporan	
					Persentase Fasilitasi Kesos yang diselenggarakan tepat waktu			100%			100%	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			809.685.000,00				3.898.931.800,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			9.685.000,00				76.156.500,00
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase desa yang memindahkan hasil pembinaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/Desa	100 %	9.685.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	76.156.500,00
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			12 Laporan			12 Laporan	
					Persentase laporan hasil fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti			100%			100%	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			800,000,000,00				3.822.775.300,00
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 Lembaga Kemasyarakatan	377.500.000,00
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangtengah Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi Kab. Ngawi, Ngawi, Margomulyo	24 Unit	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24 Unit	1.175.222.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Ngawi, Ngawi, Margomulyo Kab. Ngawi, Ngawi, Karangtengah Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi Kab. Ngawi, Ngawi, Pelem	32 Pokmas / Ormas	800,000,000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	32 Pokmas / Ormas	2.270.053.300,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			0,00				95.000.000,00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			0,00				95.000.000,00

7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase desa yang naik status	Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/Desa	78.5 %	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	78.5 %	95.000.000,00	
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		16 Laporan			16 Laporan		
						Persentase Upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		100%			100%		
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				84.310.000,00				608.518.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				84.310.000,00				608.518.000,00
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase Pemerintah Desa yang Tata Kelola Pemerintahan "baik"	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/Desa	100 %	7.645.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	351.759.000,00	
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		1 Dokumen			1 Dokumen		
						Persentase Dokumen Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang disusun tepat waktu		100%			100%		
						Persentase masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani		100%			100%		
						Persentase Pemerintah Desa yang capaian Kinerja RPJMDes yang tercapai		100%			100%		
						Persentase Pemerintah Desa yang memiliki Aparatur Desa Bersertifikat >70%		100%			100%		
						Persentase Pemerintah Desa yang tidak memiliki Temuan Keuangan		100%			100%		
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang Tata Kelola Pemerintahan "baik"	Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/Desa	100%	56.320.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100%	100.000.000,00	
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		2 Dokumen			2 Dokumen		
						Persentase Dokumen Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang disusun tepat waktu		100%			100%		
						Persentase masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani		100%			100%		
						Persentase Pemerintah Desa yang capaian Kinerja RPJMDes yang tercapai		100%			100%		
						Persentase Pemerintah Desa yang memiliki Aparatur Desa Bersertifikat >70%		100%			100%		
						Persentase Pemerintah Desa yang tidak memiliki Temuan Keuangan		100%			100%		
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang Tata Kelola Pemerintahan "baik"	Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/Desa	100 %	8.095.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	86.759.000,00	
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		4 Dokumen			4 Dokumen		
						Persentase Dokumen Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang disusun tepat waktu		100 %			100 %		

						Persentase masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani		100 %				100 %		
						Persentase Pemerintah Desa yang capaian Kinerja RPJMDes yang tercapai		100 %				100 %		
						Persentase Pemerintah Desa yang memiliki Aparatur Desa Bersertifikat >70%		100 %				100 %		
						Persentase Pemerintah Desa yang tidak memiliki Temuan Keuangan		100 %				100 %		
7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pemerintah Desa yang Tata Kelola Pemerintahan "baik"	Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/Desa	100 %	12.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %		70.000.000,00
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		1 Dokumen				1 Dokumen		
						Persentase Dokumen Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang disusun tepat waktu		100 %				100 %		
						Persentase masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani		100 %				100 %		
						Persentase Pemerintah Desa yang capaian Kinerja RPJMDes yang tercapai		100 %				100 %		
						Persentase Pemerintah Desa yang memiliki Aparatur Desa Bersertifikat >70%		100 %				100 %		
						Persentase Pemerintah Desa yang tidak memiliki Temuan Keuangan		100 %				100 %		
X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.000.000,00					72.500.000,00
X	XX	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/Desa	100%	1.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		100%		25.000.000,00
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		11 Dokumen				11 Dokumen		
						Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun		100%				100%		
X	XX	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/Desa	100 %	1.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		100 %		3.500.000,00
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen				1 Dokumen		
						Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun		100%				100%		
X	XX	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/Desa	100 %	1.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		100 %		6.500.000,00
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen				1 Dokumen		
						Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun		100%				100%		
X	XX	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/Desa	100 %	1.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		100 %		6.500.000,00

						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		2 Dokumen				2 Dokumen	
						Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun		100%				100%	
X	XX	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/Desa	100 %	1.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		100 %	6.000.000,00
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		2 Dokumen				2 Dokumen	
						Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun		100%				100%	
X	XX	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/Desa	100 %	1.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		100 %	25.000.000,00
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7 Laporan				7 Laporan	
						Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun		100%				100%	
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.500.736.138,00				7.431.700.285,00
X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/Desa	100 %	6.496.736.138,00	PENDAPATAN TRANSFER		100 %	7.381.700.285,00
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1904 Orang/bulan				1904 Orang/bulan	
						Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu		100%				100%	
X	XX	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/Desa	100 %	2.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		100 %	25.000.000,00
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan				1 Laporan	
						Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu		100%				100%	
X	XX	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/Desa	100 %	2.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		100 %	25.000.000,00
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		50 Laporan				50 Laporan	
						Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu		100%				100%	
X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				35.000.920,00				456.000.000,00
X	XX	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/Desa	100 %	4.987.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		100 %	56.000.000,00
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan							
						Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun							
X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/Desa	100 %	11.479.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		100 %	135.000.000,00

						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 Paket				2 Paket	
						Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun		100 %				100 %	
X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/Desa	100 %	3.302.420,00	PENDAPATAN TRANSFER		100 %	165.000.000,00
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket				4 Paket	
						Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun		100 %				100 %	
X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/Desa	100 %	4.012.500,00	PENDAPATAN TRANSFER		100 %	60.000.000,00
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket				2 Paket	
						Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun		100%				100%	
X	XX	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/Desa	100 %	1.200.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		100 %	5.000.000,00
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen				1 Dokumen	
						Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun		100%				100%	
X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/Desa	100 %	10.020.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		100 %	35.000.000,00
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		5 Laporan				5 Laporan	
						Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun		100%				100%	
X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0,00				700.800.000,00
X	XX	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/Desa	100 %	0,00	PENDAPATAN TRANSFER		100 %	175.000.000,00
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		8 Unit				8 Unit	
						Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan sesuai dengan kebutuhan dalam setahun		100%				100%	
X	XX	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/Desa	100 %	0,00	PENDAPATAN TRANSFER		100 %	275.800.000,00
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		29 Unit				29 Unit	
						Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan sesuai dengan kebutuhan dalam setahun		100%				100%	
X	XX	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/Desa	100 %	0,00	PENDAPATAN TRANSFER		100 %	150.000.000,00
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		19 Unit				19 Unit	
						Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan sesuai dengan kebutuhan dalam setahun		100%				100%	
X	XX	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/Desa	100 %	0,00	PENDAPATAN TRANSFER		100 %	100.000.000,00

					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		8 Unit				8 Unit		
					Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan sesuai dengan kebutuhan dalam setahun		100%				100%		
X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			189.894.080,00					384.000.000,00
X	XX	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/Desa	100 %	3.600.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		100 %	9.000.000,00
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			65 Laporan				65 Laporan	
X	XX	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/Desa	100 %	79.374.080,00	PENDAPATAN TRANSFER		100 %	95.000.000,00
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			180 Laporan				180 Laporan	
					Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun			100%				100%	
X	XX	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/Desa	100 %	72.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		100 %	200.000.000,00
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			108 Laporan				108 Laporan	
					Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun			100%				100%	
X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/Desa	100 %	34.920.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		100 %	80.000.000,00
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			48 Laporan				48 Laporan	
					Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun			100%				100%	
X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				27.550.000,00				95.000.000,00
X	XX	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/Desa	100 %	22.300.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		100 %	45.000.000,00
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			37 Unit				37 Unit	
					Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun			100%				100%	
X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/Desa	100 %	5.250.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		100 %	50.000.000,00
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			21 Unit				21 Unit	
					Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun			100%				100%	
TOTAL									7.666.736.138,00				14.760.700.085,00

Rencana Kerja Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran, program dan kegiatan, serta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Rencana Kerja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2024, sehingga perlu memperhatikan hal - hal sebagai berikut :

5.1. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Rencana Kerja Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2024 antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Rencana Kerja Kecamatan Ngawi pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Ngawi;
2. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ngawi ini juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Kecamatan Ngawi ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran sebelum

ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2024;

2. Dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Ngawi. Begitu pula dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Rencana Kerja Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Kabupaten Ngawi Tahun 2024 pada triwulan satu sampai dengan triwulan empat tahun 2024. Selanjutnya program dan kegiatan pada Rencana Kerja Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh aparat Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Ngawi.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Rencana Kerja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi pada Tahun Anggaran 2024.

BUPATI NGAWI



ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
INSPEKTORAT**

Jalan Teuku Umar No. 12 Kode Pos 63211
Telp. (0351) 749016 Fax (0351) 749016 Email : inspektorat@ngawikab.go.id
Website : [http:// www.inspektorat.ngawikab.go.id](http://www.inspektorat.ngawikab.go.id)

**CATATAN HASIL REVIU
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN NGAWI
TAHUN ANGGARAN 2024**

INSPEKTORAT KABUPATEN NGAWI	Disusun oleh/ Tanggal	INEKE KUSUMADEWI 4 Agustus 2023
	Direviu oleh/ Tanggal	HARI SISWANTO 4 Agustus 2023
	Disetujui oleh/ Tanggal	JASEMAN 4 Agustus 2023

Uraian Catatan Hasil Reviu

Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Ngawi Nomor 800.1.11.1/38/404.200/2023 tanggal 31 Juli 2023 untuk melaksanakan Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut:

DATA UMUM :

Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2024 pada Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi berdasarkan Dokumen Rumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah sebesar Rp7.666.736.138,00,00 telah sesuai dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 25 Tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2024.

1. Kelengkapan Dokumen Pendukung Rencana Kerja

Berdasarkan pengujian atas kelengkapan dokumen pendukung, diperoleh hasil bahwa kelengkapan dokumen pendukung untuk penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2024 sudah lengkap.

Kesimpulan : Berdasarkan hasil reviu, kelengkapan dokumen pendukung rencana kerja sudah lengkap.

2. Kesesuaian Rancangan Akhir Rencana Kerja Dengan Renstra Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2024

Berdasarkan pengujian atas Kesesuaian Rancangan Akhir Rencana Kerja Dengan Renstra dan RKPD Tahun 2024, diperoleh hasil bahwa untuk penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2024 telah sesuai dengan Renstra Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi dan RKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2024.

Kesimpulan : Berdasarkan hasil revidi, Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja telah sesuai dengan Renstra 2021-2026 dan RKPD Tahun 2024.

3. Penyusunan Substansi Antar Bab Rancangan Akhir Renja

Berdasarkan pengujian atas Penyusunan Substansi Antar Bab Rancangan Akhir Rencana Kerja, diperoleh hasil bahwa untuk penyusunan Substansi Antar Bab Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2024 telah sesuai ketentuan yang berlaku.

Kesimpulan : Berdasarkan hasil revidi, Penyusunan Substansi Antar Bab Rancangan Akhir Renja telah sesuai.

4. Analisis Kesesuaian Kebijakan Daerah Dengan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan pengujian atas Kesesuaian Kebijakan Daerah Dengan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah, diperoleh hasil bahwa untuk Kesesuaian Kebijakan Daerah Dengan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2024 telah sesuai.

Kesimpulan : Berdasarkan hasil revidi, Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi telah secara terinci menjelaskan Kesesuaian Kebijakan Daerah Dengan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah.

5. Keselarasan Program dan Kegiatan Dengan Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang

Berdasarkan pengujian atas Keselarasan Program dan Kegiatan Dengan Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Kecamatan, diperoleh hasil bahwa untuk Keselarasan Program dan Kegiatan Dengan Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2024 telah selaras.

Kesimpulan : Berdasarkan hasil revidi, Program dan Kegiatan pada Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja telah selaras dengan Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang.

6. Keselarasan Rencana Program Prioritas Daerah Beserta Pagu Indikatifnya

Berdasarkan pengujian atas Keselarasan Rencana Program Prioritas Daerah Beserta Pagu Indikatifnya, diperoleh hasil bahwa untuk Keselarasan Rencana Program Prioritas Daerah Beserta Pagu Indikatifnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2024 telah selaras dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 25 Tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2024.

Kesimpulan : Berdasarkan hasil revidi, Rencana Program Prioritas Daerah Beserta Pagu Indikatifnya pada Rancangan Akhir Rencana Kerja telah selaras dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 25 Tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2024.

7. Koreksi/ Perbaikan yang belum/tidak disetujui

8. Rekomendasi

a.n. Camat Ngawi Kabupaten Ngawi
Sekretaris,
u.b
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan



Sri Wahyuni, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19660616 199010 2 001

Inspektur Pembantu Wilayah II
~~selaku~~ Pengendali Mutu



Jaseman, SSTP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19750411 199601 0 001



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan Teuku Umar No. 12 Kode Pos 63211 Telp/Fax (0351) 746843
Email : bappeda@ngawikab.go.id
Website : <http://www.bappeda.ngawikab.go.id>

BERITA ACARA
VERIFIKASI TAHAP AKHIR
RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
KECAMATAN NGAWI

Pada hari ini Senin, 07 Agustus 2023, bertempat di Aula Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Ngawi telah dilaksanakan verifikasi Rancangan Renja Kecamatan Ngawi Tahun 2024 dengan catatan substansi pada lembar verifikasi sebagaimana terlampir. Selanjutnya hasil verifikasi akan segera ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah sebagai bahan penyempurnaan pada Tahapan Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah.

Demikian Berita Acara ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PERENCANA PERANGKAT DAERAH	VERIFIKATOR BAPPEDA
 SRI WANYUNI, SH	KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA  ERNA INDRAWATI, S.E
 ENDANG PURWATINGSIH	 GURUH MARDIYANTORO, SE, M.SI

**LEMBAR VERIFIKASI TAHAP AKHIR
RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

NAMA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN
PROVINSI

: Kecamatan Ngawi
: Ngawi
: Jawa Timur

Tanggal Verifikasi : 7 Agustus 2023

NO	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			CATATAN
			Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	
I	PENDAHULUAN					
1.1	Latar Belakang					
	Menjelaskan mengenai :	a Pengertian	✓			
		b Proses penyusunan Renja				
		c Keterkaitan renja dengan RKPD	✓			
		d Keterkaitan renja dengan Renstra Perangkat Daerah	✓			
		e Tindak Lanjut dengan proses penyusunan RAPBD	✓			
1.2	Landasan Hukum	Point-Point yang menjadi dasar Hukum disesuaikan dengan Perangkat Daerah				
1.3	Maksud dan Tujuan	Uraian Maksud dan Tujuan harus sesuai	✓			
1.4	Sistematika Penulisan	Uraian Sistematika Renja sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017	✓			
II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU					
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat	a Pokok materi disampaikan sesuai Permendagri No. 86 Tahun 2017	✓			
		b Format tabel 2.1 sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017 (HARUS AMBIL DARI APLIKASI SMEP EVALUASI RENJA TRIWULAN IV TAHUN 2022)	✓			
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	a Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing. Perangkat Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.	✓			
		b Format tabel 2.2 sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017	✓			

NO	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			CATATAN
			Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah					
	Menjelaskan mengenai :	a	Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah	✓		
		b	Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tupoksi Perangkat Daerah	✓		
		c	Dampak terhadap visi misi kepala daerah, capaian program nasional/internasional	✓		
		d	Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan Perangkat Daerah	✓		
		e	Formulasi isu-isu penting, rekomendasi, catatan strategis untuk di TL pada tahun perencanaan	✓		
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD					
	Menjelaskan mengenai :	a	Proses membandingkan Ranwal RKPD dengan analisis kebutuhan Perangkat Daerah	✓		
		b	Alasan proses review dilakukan	✓		
		c	Temuan setelah proses review	✓		
		d	Format tabel 2.4 sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017	✓		
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (usulan hasil musrenbangcam, usulan dari Pokir DPRD, dan usulan langsung dari masyarakat)					
	Menjelaskan mengenai :	a	Menjelaskan proses usulan tersebut diperoleh	✓		
		b	Menjelaskan kesesuaian usulan dengan isu strategis dan tupoksi Perangkat Daerah	✓		
		c	Format tabel 2.5 sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017	✓		
III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH					
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional		Menjelaskan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	✓		
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah		Merumuskan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah	✓		

NO	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			CATATAN
			Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	
IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH					
	Menjelaskan mengenai :	a	Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan	✓		
		b	Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan	✓		
		c	Rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD	✓		
		d	Format tabel 4.1 sesuai Permendagri No 80/2017	✓		
V	PENUTUP					
	Berisikan uraian penutup :	a	Catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun sehubungan ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan ketentuan	✓		
		b	Kaidah-kaidah pelaksanaan	✓		
		c	Rencana tindak lanjut	✓		
		d	Pada bagian lembar terakhir diberikan space untuk nama dan tanda tangan Kepala Daerah			
VI	LAMPIRAN					
	Matriks Program/Kegiatan sesuai Pemutakhiran Ketiga Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	a	Matriks Program/Kegiatan/Subkegiatan (DOKUMEN AD EXCEL DARI SIPD-RI, KEMUDIAN SECARA MANUAL INDIKATOR DISESUAIKAN DENGAN PERUBAHAN RENCANA/SEMUA INDIKATOR TAMPIL)	✓		
		b	Nomenklatur Program/Kegiatan/Subkegiatan disesuaikan DENGAN HASIL PEMUTAKHIRAN RENCANA SIPDO-RI	✓		

VERIFIKATOR		
NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	ERINA INDRAWATI-SE	
2.	SURUH MARDYANTORSEMSI	



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan Teuku Umar No. 12 Kode Pos 63211 Telp/Fax (0351) 746843
Email : bappeda@ngawikab.go.id
Website : <http://www.bappeda.ngawikab.go.id>

BERITA ACARA
VERIFIKASI TAHAP PERTAMA
RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
KECAMATAN NGAWI

Pada hari ini Jumat, 28 Juli 2023, bertempat di Ruang Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi telah dilaksanakan verifikasi Rancangan Renja Kecamatan Ngawi Tahun 2024 dengan catatan substansi pada lembar verifikasi sebagaimana terlampir. Selanjutnya hasil verifikasi akan segera ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah sebagai bahan penyempurnaan pada Tahapan Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah.

Demikian Berita Acara ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PERENCANA PERANGKAT DAERAH	VERIFIKATOR BAPPEDA
 SRI WAHYUNI, SH	 ERNA INDRAWATI, S.E
 ENDANG PURWATININGSIH	 GURUH MARDIYANTORO, S.E. M.Si

**LEMBAR VERIFIKASI TAHAP AKHIR
RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

NAMA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN
PROVINSI


: KEC. NGAWI
: Ngawi
: Jawa Timur

Tanggal Verifikasi : 28 Juli 2023

NO	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			CATATAN
			Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	
I PENDAHULUAN						
1.1	Latar Belakang		✓			
	Menjelaskan mengenai :	a Pengertian				
		b Proses penyusunan Renja			✓	DITAMBAHI NUR PROSES
		c Keterkaitan renja dengan RKPD	✓			
		d Keterkaitan renja dengan Renstra Perangkat Daerah	✓			
		e Tindak Lanjut dengan proses penyusunan RAPBD				
1.2	Landasan Hukum	Point-Point yang menjadi dasar Hukum disesuaikan dengan Perangkat Daerah	✓			
1.3	Maksud dan Tujuan	Uraian Maksud dan Tujuan harus sesuai	✓	✓		NARASI DITAMBAHI DAN DISERAH
1.4	Sistematika Penulisan	Uraian Sistematika Renja sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017	✓			
II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU						
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat	a Pokok materi disampaikan sesuai Permendagri No. 86 Tahun 2017	✓			DITAMBAHI
		b Format tabel 2.1 sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017 (HARUS AMBIL DARI APLIKASI SMEP EVALUASI RENJA TRIWULAN IV TAHUN 2022)	✓			↑
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	a Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing. Perangkat Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan	✓			
		b Format tabel 2.2 sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017	✓			
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah					
	Menjelaskan mengenai :	a Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah	✓			
		b Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tupoksi Perangkat Daerah	✓			
		c Dampak terhadap visi misi kepala daerah, capaian program nasional/internasional	✓			

NO	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			CATATAN
			Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	
		d Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan Perangkat Daerah	✓			
		e Formulasi isu-isu penting, rekomendasi, catatan strategis untuk di TL pada tahun perencanaan	✓			
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD					
	Menjelaskan mengenai :	a Proses membandingkan Ranwal RKPD dengan analisis kebutuhan Perangkat Daerah	✓			
		b Alasan proses review dilakukan	✓			
		c Temuan setelah proses review	✓			
		d Format tabel 2.4 sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017	✓			
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (usulan hasil musrenbangcam, usulan dari Pokir DPRD, dan usulan langsung dari masyarakat)					
	Menjelaskan mengenai :	a Menjelaskan proses usulan tersebut diperoleh		✓		HARUS DIBENahi SESUAI SI
		b Menjelaskan kesesuaian usulan dengan isu strategis dan tupoksi Perangkat Daerah		✓		
		c Format tabel 2.5 sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017		✓		
III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH					
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	Menjelaskan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah		✓		HARUS DIBENahi SESUAI DI
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	Merumuskan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah		✓		

NO	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			CATATAN
			Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	
IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH					
	Menjelaskan mengenai :	a	Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan	✓		
		b	Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan	✓		
		c	Rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD	✓		
		d	Format tabel 4.1 sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017		✓	
V	PENUTUP					
	Berisikan uraian penutup :	a	Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan	✓		
		b	Kaidah-kaidah pelaksanaan	✓		
		c	Rencana tindak lanjut	✓		
		d	Pada bagian lembar terakhir diberikan space untuk nama dan tanda tangan Kepala Daerah.			
VI	LAMPIRAN					
	Matriks Program/Kegiatan sesuai Pemutakhiran Ketiga Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	a	Matriks Program/Kegiatan/Subkegiatan (DOWNLOAD EXCEL DARI SIPD-RI, KEMUDIAN SECARA MANUAL INDIKATOR DISESUAIKAN DENGAN PERUBAHAN RENSTRA/SEMUA INDIKATOR TAMPIL)			✓ Cukup & Lengkap
		b	Nomenklatur Program/Kegiatan/Subkegiatan telah disesuaikan DENGAN HASIL PEMUTAKHIRAN KETIGA SIPDO-RI			✓ Cukup & Lengkap

VERIFIKATOR		
NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	ERNA INDRAWATI, SE	
2	GURUH MARDIANTORO, SE.,M.Si	